

RENCANA STRATEGIS

2015–2019



PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015–2019 menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi (PPSDK) dan bidang-bidang kerja yang berada di bawahnya, yaitu Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan dan Bidang Diplomasi Kebahasaan.

Renstra PPSDK memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, serta struktur program dan kegiatan yang akan dilaksanakan PPSDK, termasuk Subbagian Tata Usaha PPSDK. Renstra ini digunakan sebagai pedoman dan garis haluan dalam pengembangan strategi dan Diplomasi Kebahasaan, terutama dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan penginternasionalan bahasa Indonesia serta mengevaluasi hasil kinerja PPSDK pada 2015–2019.

Jakarta, November 2015

Prof. Dr. Emi Emilia
Kepala Pusat

RINGKASAN EKSEKUTIF

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK), Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 merupakan penjabaran dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019. Berdasarkan landasan historis, kultural, politis, dan hukum, PPSDK Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan garis haluan dan kebijakan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, PPSDK menetapkan visi 2019 berupa “Melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, kami bertekad menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2019”.

Untuk mewujudkan visi itu, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan memiliki misi sebagai berikut.

- 1) melaksanakan kebijakan yuridis, politis, dan akademis kebahasaan;
- 2) melaksanakan kiprah dalam pendidikan dan misi perdamaian;
- 3) melaksanakan kajian pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan;
- 4) melaksanakan pelibatan publik nasional dan internasional; dan
- 5) melaksanakan tata kelola secara efektif dan efisien.

Dalam mewujudkan visi dan misinya, PPSDK Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang diwujudkan dalam program dan kegiatan selama kurun waktu 2015–2019. Dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, PPSDK tetap mengacu pada garis haluan yang ditetapkan dalam Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Pengantar	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Sistematika Renstra.....	7
BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN	8
2.1 Visi Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	8
2.2 Misi Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	8
2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan	8
2.4 Tata Nilai Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan ..	12
BAB III ANALISIS KONDISI SAAT INI	13
3.1 Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan	13
3.2 Bidang Diplomasi Kebahasaan	16
3.3 Pengelolaan Kelembagaan PPSDK.....	18
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KEGIATAN PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN	20
4.1 Target Kinerja	20
4.2 Kerangka Pendanaan	26
4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi	26
BAB V PENUTUP	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) merupakan unit kerja baru yang diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 7 April 2014 dalam satu rangkaian peresmian Kawasan Perdamaian dan Keamanan Indonesia atau Indonesia Peace and Security Centre/IPSC. Mulai tahun 2015, PPSDK bergerak menjawab tantangan zaman global di bawah naungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memanfaatkan potensi bahasa guna mendukung keikutsertaan Indonesia dalam pelaksanaan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Keikutsertaan Indonesia untuk mewujudkan dunia damai dan sejahtera ini telah sejalan dengan kebijakan nasional kebahasaan.

Dari aspek politik kebahasaan, Indonesia telah mengambil pilihan yang sangat tepat untuk menjadikan elemen bahasa sebagai landasan pembentukan nasionalitas negara bangsanya. Selain bahasa, ada juga elemen agama atau ras/suku yang sesungguhnya dapat dipilih oleh pendiri negara bangsa (seperti Afrika Selatan). Jika etnis yang dipilih sebagai representasi keindonesiaan sebagai negara bangsa, akan sangatlah sulit untuk menentukan pilihan itu dan boleh jadi pilihan itu justru menempatkan cita-cita membangun NKRI hanya sebatas angan-angan belaka, apalagi cita-cita ikut mewujudkan perdamaian dunia. Kalau pembentukan Indonesia tidak berdasarkan pilihan bahasa, Indonesia akan sulit mewujudkan kehidupan damai dengan adanya keberagaman etnik yang berpotensi memunculkan konflik.

Begitu pula, jika elemen agamanya yang dipilih, agama yang manakah dari enam agama yang diakui negara menjadi representasi keberadaan NKRI? Kegagalan Piagam Jakarta, khususnya penolakan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dalam rumusan Pancasila yang pertama (“Ketuhanan Yang Maha Esa dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya”) menunjukkan betapa elemen agama akan memperlemah semangat membangun keindonesiaan (baca Mahsun, 2015). Oleh karena itu, tidaklah keliru para pendiri bangsa Indonesia ini mengedepankan bahasa Indonesia sebagai fondasi dalam membangun nasionalitas negara bangsa Indonesia. Mengenai fondasi keindonesiaan itu, silang pendapat—apakah bahasa Melayu ataukah bahasa Indonesia—telah terselesaikan melalui teks Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

Pada tahun 1926, ketika berlangsung Kongres Pemuda Indonesia I, bahasa Melayu memang sempat diusulkan oleh M. Yamin. Namun, Yamin berkompromi dengan M. Tabrani dan kawan-kawan dengan bertumpu hanya pada satu kepentingan bersama untuk menjadi sesama bangsa Indonesia. Yamin tidak berkeras hati; ia bersedia menerima ajakan Tabrani untuk “melahirkan” bahasa Indonesia. Dalam kaitan itu, bahasa Indonesia--sama halnya dengan bahasa mana pun di dunia--tentu tidak lahir dari kekosongan. Keberadaan bahasa Melayu yang terlebih dahulu menghasilkan lahirnya berbagai bahasa daerah di Indonesia dapat disebut sebagai induk kelahiran bahasa Indonesia. Persoalan selalu muncul: apakah induk dan anak itu sama atau beda maujudnya? Atas pertanyaan itu, jawabannya tentu menuntut cara pandang bangsa Indonesia, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap bangsa lain.

Ketika bangsa Indonesia memandang ke dalam negeri sendiri, sebagaimana tuntunan isi teks Sumpah Pemuda 1928 tersebut, kondisi keberbedaan Indonesia diakui dan dilihat dari kesamaannya. Dari cara

pandang itulah, bahasa Indonesia sangat tepat dilahirkan semata-mata sebagai bahasa persatuan. Perkembangan atau perubahan cara pandang itu pun perlu terjadi, terutama setelah bangsa Indonesia terbentuk hampir 90 tahun atas dasar kesamaan bahasanya. Aksi dan reaksi bangsa Indonesia terhadap kecenderungan deras arus globalisasi dalam berbagai sendi kehidupan perlu dilakukan untuk melanjutkan pembentukan bangsa Indonesia guna meraih cita-cita Kemerdekaannya.

Pendirian PPSDK dimaksudkan untuk menjawab tuntutan zaman atas globalisasi yang sedang berlangsung dan menempatkan setiap bangsa berada dalam persaingan. Persaingan global itu menuntut bangsa Indonesia terus menguatkan identitas atau jati dirinya dan--bahkan-- identitas keindonesiaan itu mutlak perlu dihadirkan ke dalam dunia global agar keberadaan bangsa Indonesia makin diakui dan dihormati oleh masyarakat sedunia. Kehormatan bangsa Indonesia yang perlu terus diperjuangkan itu dipersyaratkan untuk keikutsertaan Indonesia mewujudkan dunia damai. Untuk menghadapitangan zaman seperti itu, diperlukan adanya suatu garis kebijakan yang dapat mengatur dengan cermat dan tepat serta arif bijaksana dalam pembagian peran yang akan dan harus dimainkan dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan. Garis kebijakan periodik lima tahunan yang menangani permasalahan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan perlu dituangkan dalam Rencana strategis (Renstra) PPSDK sebagai bagian dari Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

Perlu disebutkan bahwa sebelum PPSDK dibentuk, Badan Bahasa telah terlebih dahulu memiliki dua unit kerja eselon II yang bertugas menjalankan fungsi pokok masing-masing. Pada satu sisi, bahasa Indonesia perlu terus diperkaya daya ungkapnya, antara lain, melalui pembakuan kosakata dari penggalian unsur-unsur bahasa pendukungnya di seluruh Indonesia dan sekaligus menjadi pelindungan bahasa daerah.

Pada sisi lain, penutur muda bahasa Indonesia juga perlu terus dibina, antara lain, melalui jalur pendidikan formal di seluruh Indonesia, di samping melalui jalur pembinaan penutur dewasa dan usia lanjut yang sebagiannya juga masih menyandang buta bahasa Indonesia. Keberadaan unit baru PPSDK ini sangat penting untuk melengkapi penyelenggaraan program pengembangan dan pembinaan bahasa, yaitu peningkatan peran bahasa sebagai upaya peningkatan peran bangsa Indonesia di dunia internasional.

Salah satu kekhasan atas keberadaan unit baru PPSDK ini ialah pengembangan bahasa asing yang bernilai strategis untuk meningkatkan peran bangsa Indonesia di dunia internasional. Bahasa asing strategis (bahasa resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, bahasa negara tetangga sekawasan Asia Tenggara, dan bahasa asing strategis lainnya) dikembangkan di PPSDK, tidak dimaksudkan untuk menjadikan anak-anak bangsa Indonesia sebagai penutur jati bahasa-bahasa itu, tetapi dimaksudkan untuk dijadikan akses peningkatan peran bangsa Indonesia dan peningkatan fungsi bahasa Indonesia di dunia global. Akses lain yang dikembangkan oleh PPSDK adalah penerjemahan yang dilaksanakan melalui kegiatan alih bahasa lisan (*interpreting*) dan penerjemahan tulis terhadap buku teks dan dokumen bernilai strategis bagi peningkatan peran bahasa dan bangsa Indonesia itu di dunia internasional.

Pengembangan strategi kebahasaan yang diimplementasikan dalam diplomasi kebahasaan tersebut juga mencakupi pengkajian kebinekaan bangsa Indonesia melalui bahasa untuk mencari ketunggalikaan atas fakta keanekaragaman bahasa. Melalui pemanfaatan potensi bahasa itulah, kebinekatunggalikaan itu dapat ditemukan sehingga keberhasilan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang berbineka itu dapat dijadikan modal besar untuk mempromosikan peran bahasa Indonesia di dunia internasional. Salah

satu kegiatan diplomasi kebahasaan itu dilakukan melalui pengelolaan laboratorium kebinekaan bahasa.

Selain itu, laboratorium forensik kebahasaan juga dikembangkan untuk melakukan kajian atas perilaku berbahasa, baik pada tataran individual maupun kolektif, yang patut diduga telah dan akan menimbulkan konflik antar-individu, antar-kelompok masyarakat, dan—bahkan—antar-bangsa/negara. Kejahatan transnasional—terutama dalam perkembangan global—tidak tertutup kemungkinannya diniatkan dan dilakukan melalui perilaku atau tindakan kebahasaan. Penghancuran negara bangsa oleh oknum atau sekelompok orang terorganisasi secara nasional dan/atau secara internasional sebagai tujuan perang tanpa senjata (*proxy war*) di era global perlu diantisipasi dengan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Renstra Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan pada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015–2019 adalah sebagai berikut.

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
- (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- (6) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

- (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005–2025.
- (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.
- (9) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- (10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- (11) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga.
- (12) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (13) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Layanan Keuangan dan Kinerja.
- (14) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- (15) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6/2006 tentang Pengelolaan BMN/Daerah.
- (16) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia.
- (17) Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Organisasi
- (18) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015.
- (19) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.
- (20) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2014–2019.
- (21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah.

- (22) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kewajiban Pencantuman Label Berbahasa Indonesia pada Barang.
- (23) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa.
- (24) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa.
- (25) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (26) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- (27) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.

1.3 Sistematika Renstra

Telah disebutkan bahwa mulai tahun 2015 unit baru PPSD bergerak melaksanakan tugas dan fungsi pokok untuk menjawab tantangan global. Oleh karena itu, rumusan renstra PPSDK ini tidak mencakupi bagian telaah capaian terdahulu. Bagian berikut setelah Pendahuluan ini adalah rumusan visi, misi dan tujuan Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. Bab III adalah analisis kondisi dengan SWOT dan Bab IV.

BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN
PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN

2.1 Visi Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Dengan memperhatikan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019, tugas dan fungsi Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, serta politik nasional kebahasaan, PPSDK menetapkan visi 2019 sebagai berikut: “Melalui Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, kami bertekad menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2019”.

2.2 Misi Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Untuk mewujudkan visi itu, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan memiliki misi sebagai berikut.

- 1) melaksanakan kebijakan yuridis, politis, dan akademis kebahasaan;
- 2) melaksanakan kiprah dalam pendidikan dan misi perdamaian;
- 3) melaksanakan kajian pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan;
- 4) melaksanakan pelibatan publik nasional dan internasional; dan
- 5) melaksanakan tata kelola secara efektif dan efisien.

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Dalam Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 telah ditetapkan tujuan strategis pembangunan pendidikan yang berkaitan dengan penanganan kebahasaan dan kesastraan di Indonesia yaitu *Peningkatan Jati Diri Bangsa*

melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan.

Tujuan strategis Badan Bahasa adalah Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui bahasa Indonesia serta pemakaian bahasa sebagai sarana pencerdasan bangsa.

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis tersebut diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2019. Sasaran strategis Badan Bahasa tersebut adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya mutu bahasa dan pemakaiannya sebagai penghela ipteks dan penguat daya saing Indonesia
2. Meningkatnya peran bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan di kawasan Asean

Tujuan strategis dan sasaran strategis 2015–2019 dicapai dengan menggunakan strategi pencapaian sebagai berikut.

1. Penguatan regulasi dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan
2. Pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan secara terarah, sistematis, dan berkelanjutan dengan fokus pada pelibatan publik dan pemanfaatan media baru.
3. Peningkatan jumlah dan mutu inovasi pembelajaran bahasa Indonesia untuk komunikasi internasional dalam pendidikan bertaraf internasional, baik jalur kerja sama formal, nonformal, informal.
4. Penguatan jejaring dan kerja sama pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional.
5. Peningkatan promosi kebahasaan untuk perluasan wilayah pakai bahasa Indonesia di luar negeri.

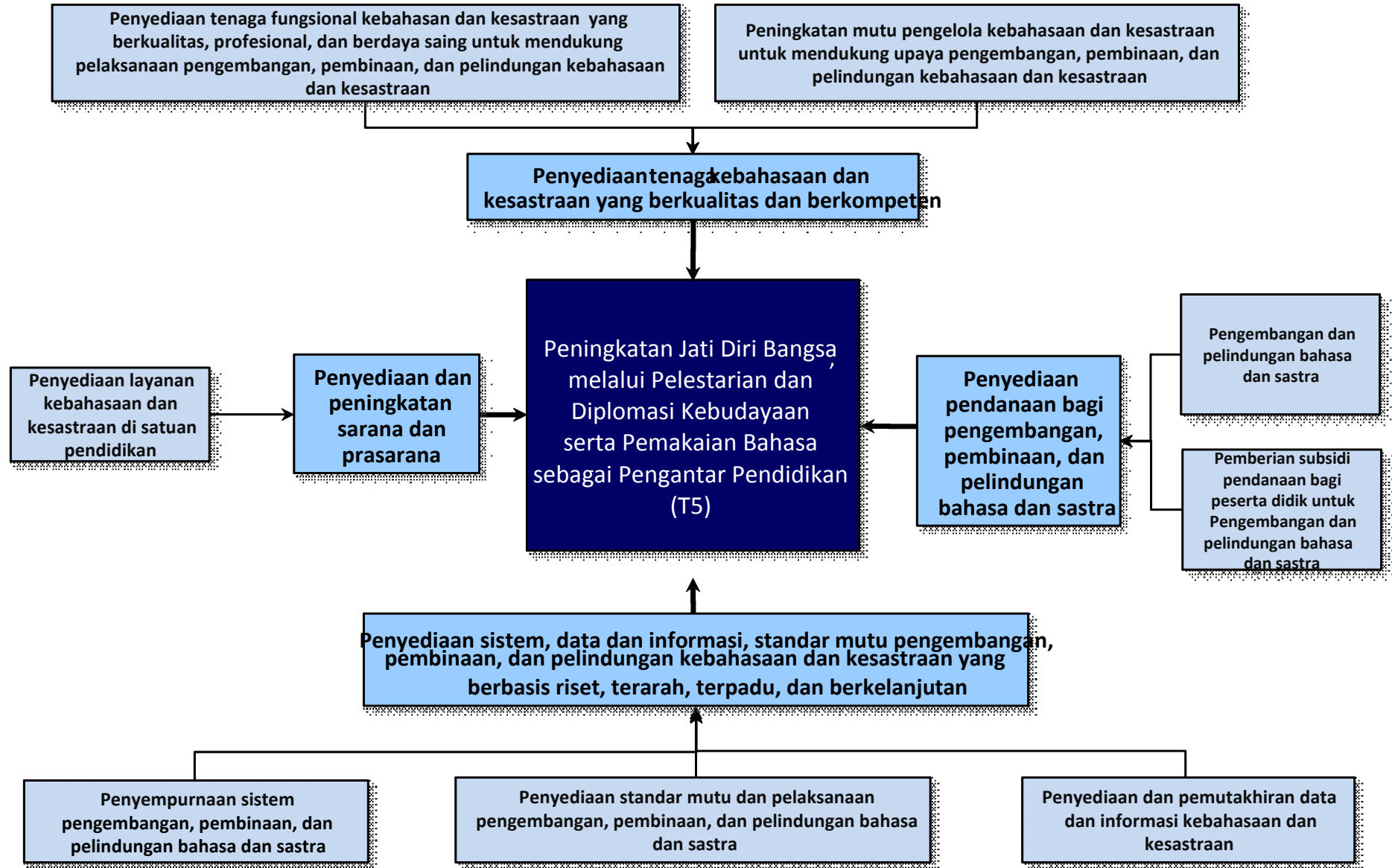
Penahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis Badan Bahasa ditunjukkan pada tabel berikut.

Penahapan Pencapaian Sasaran Strategis

KODE	SS/IKSS	Sat	2015	2016	2017	2018	2019
SS13	Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Perhubungan di Kawasan ASEAN						
IKSS 13.1	Jumlah pemelajar BIPA di kawasan Asean sebanyak 1000 orang	org	560	670	780	890	1.000
IKSS 13.2	Jumlah penutur non-Indonesia di kawasan Asean yang menggunakan bahasa Indonesiasebanyak 2500 orang	org	980	1.310	2.100	2.300	2.500

Sementara itu, kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan yang dikaitkan dengan program dan kegiatan pembangunan pendidikan nasional 2015–2019 dapat dijabarkan pada gambar berikut.

Gambar 4.5 Kerangka berpikir penerapan strategi pencapaian tujuan strategis Badan Bahasa



2.4 Tata Nilai Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati serta diamalkan oleh seluruh pegawai Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut tumbuh dan berkembang dalam organisasi serta dapat berfungsi sebagai pendorong berkembangnya semangat untuk berusaha memberikan yang terbaik.

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 telah menetapkan tujuh tata nilai untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima pendidikan. Tata nilai ini juga merupakan salah satu acuan yang dapat diyakini dan dihayati oleh seluruh pegawai dan diamalkan dalam perilaku agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi organisasi secara produktif. Nilai-nilai yang disepakati untuk dijadikan acuan oleh segenap pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa merujuk pada nilai-nilai yang telah disepakati dan dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tata nilai yang dimaksud adalah sebagai berikut.

1) Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan.

2) Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3) Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk memperbaiki atau

meningkatkan hasil pekerjaan, dan menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah.

4) Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan mejadikan pelajaran atas setiap kejadian.

5) Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya.

6) Terlibat Aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

7) Tanpa Pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

Dengan merujuk pada fokus pembangunan pendidikan tahun 2010–2014, dari tujuh tata nilai tersebut dipilih yang sesuai dengan fokus pada periode ini dan dirangkum dalam satu kalimat motto:

**Mengembangkan strategi dan Diplomasi
kebahasaan sebagai pengungkit daya saing bangsa**

BAB III

ANALISIS KONDISI SAAT INI

Kondisi yang secara umum saat ini dihadapi dalam pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan dapat dianalisis dengan menggunakan SWOT untuk memastikan posisi PPSDK baik secara internal maupun secara eksternal. Analisis mendalam terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dapat memberikan arah kebijakan untuk mengembangkan PPSDK pada masa yang akan datang. Sejalan dengan itu, analisis SWOT dilakukan terhadap bidang: (1) pengembangan strategi kebahasaan dan (2) diplomasi kebahasaan serta (3) pengelolaan kelembagaan.

3.1 Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan

1) *Kekuatan*

Bidang ini memiliki kekuatan nama *strategi kebahasaan* yang disandangnya. Sebagai *nama*, kata *strategi* telah menjadi pengetahuan umum sehingga masyarakat umum mudah memahami makna-makna yang terkandung dalam kata itu. Secara umum, kata *strategi* bermakna cara, teknik, atau taktik untuk melakukan atau berbuat sesuatu. Secara khusus, di lingkungan kawasan Pusat Perdamaian dan Keamanan Indonesia (*Peace and Security Center/IPSC*), kata dasar *strategi* digunakan untuk menamai IPSC sebagai kawasan instalasi strategis nasional dan badan pengelola kawasan ini dinamai Badan Instalasi Strategis Nasional (*Bainstranas*). Selain nama badan pengelola kawasan itu, terdapat penamaan lain, selain PPSDK, yang menggunakan kata dasar strategi, yaitu nama gedung *Strategic Building* dan nama program studi Strategi Perang di Universitas Pertahanan.

Selain kemudahan untuk memahami makna kata *strategi*, konsep ‘strategi kebahasaan’ juga memiliki kekuatan ideologis yang mengacu pada proses pembentukan negara bangsa Indonesia. Sudah mafhum bahwa negara bangsa Indonesia didirikan dan diharapkan tetap berdiri

atas fondasi bahasa, bukan fondasi agama atau ras/suku. Bahasa—sekali lagi bukan agama dan bukan pula ras/suku—yang digunakan sebagai pembentuk cara pandang keindonesiaan. Bahasa telah membentuk revolusi mental dari pola pikir kesukuan dan ketercerai-beraian atas perairan dan belasan ribu kepulauan menjadi pola pikir keindonesia yang bersatu. Revolusi mental bangsa Indonesia itu telah dicanangkan dengan pernyataan Sumpah Pemuda 1928 dan pernyataan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Pasal 36).

2) Kelemahan

Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan memiliki kelemahan di samping kekuatan tersebut. Pemahaman makna umum terhadap nama *strategi kebahasaan* itu berakibat pada lemahnya pemahaman makna khusus penamaan bidang ini. Sering dipahami strategi kebahasaan sebagai suatu cara, teknik, atau taktik berbicara seperti halnya pemahaman terhadap konsep *kompetensi strategis* (*strategic competence*) yang dikembangkan para linguist seperti Bahman (1996) dengan mengacu pada *strategi komunikasi berbahasa*. Nama bidang *Pengembangan Strategi Kebahasaan* lebih banyak mengacu pada upaya linguistik yang dikembangkan untuk mencari dan menemukan potensi bahasa sebagai pembentuk ideologi kebahasaan pada warga dan negara bangsa Indonesia. Salah satu potensi bahasa yang dicari dan ditemukan itu ialah kebinekatunggalikaan warga bangsa Indonesia. Karena konsep strategi kebahasaan ini masih relatif baru, pemahaman atas konsep khusus bidang ini masih sulit diperoleh.

3) Peluang

Peluang untuk mengembangkan strategi kebahasaan masih terbentang sangat luas, antara lain karena pemahaman dan fokus perhatian terhadap masalah kebahasaan masih dicurahkan pada permasalahan bahasa per bahasa sebagai sarana komunikasi: misalnya masalah bagaimana strategi berbahasa Indonesia, berbahasa Inggris, berbahasa Jawa, dan sebagainya. Peluang pengembangan strategi kebahasaan terbuka lintas-bahasa sehingga dalam usaha linguistik, misalnya untuk menemukan kebinekatunggalikaan bangsa Indonesia, terbentang lintas-bahasa Indonesia dan daerah.

Sebagai contoh, bangsa Indonesia sangat berbineka, tetapi bersatu dalam cara memandang alam semesta dengan telah menempatkan

bentuk kata *hati* lebih tinggi dari pada bentuk Bahasa lainnya. Sebagai makna atau nilai dasar watak yang dianut bangsa dalam memandang alam semesta itu, terdapat ungkapan: *kecil hati*, *buah hati*, *sakit hati*, *berat hati*, *bulat hati*, *hancur hati*, *terang hati*, *setengah hati*, *kaya hati*, *jantung hati*, *tinggi hati*, *besar hati*, *hati kecil*, *keras hati*, *jantung hati*, *jatuh hati*. Konsep seperti kekayaan, kesakitan, dan kehancuran belum dianggap paling bermakna bagi orang Indonesia sebelum hal itu menyentuh makna hati. Hal yang sama dengan konsep *hati* tersebut terdapat dalam cara pandang pada kelompok-kelompok komunitas atau masyarakat suku bangsa Indonesia seperti pada masyarakat etnis Sumbawa: juga dikenal kata *lenge ate* ('burukhati'), *balong ate* ('baikhati'), *nyaman ate* ('was-was'), *saket ate* ('sakithati'), *ode ate* ('kecilhati'), *rano ate* ('besarhati'), *ini ate* ('orang sombong'), *nyaman ate* ('senanghati'), *sa ate* ('sehati'), *rangate* ('ingatdengan orang lain'), *noya ate* ('takpeduli'), *rusak ate* ('terdampakburuk'), *ling ate* ('kata hati'), *basai ate* ('menyatu'), *sanyaman ate* ('kenyamanan hati'). Data kebahasaan itu menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki ungkapan bahasa yang berbeda-beda, tetapi bermakna sama dalam hal cara memandang alam semesta.

4) Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan dapat diidentifikasi sumbernya dari dalam dan dari luar bidang ini. Dari dalam tantangannya dapat berupa sumber daya manusia yang memahami perbandingan antar-bahasa untuk mencari dan menemukan persamaan di tengah perbedaan atau-sebaliknya perbedaan di tengah anggapan adanya kesamaan fenomena antar-bahasa sesuai dengan kepentingan nasional negara bangsa Indonesia. Tantangan dari luar bidang dapat dilihat dari adanya pemahaan yang belum komprehensif terhadap pentingnya potensi bahasa sebagai pembentuk identitas negara dan jati diri bangsa, terutama di era globalisasi yang cenderung menempatkan hanya satu bahasa komunikasi global, yaitu bahasa Inggris.

3.2 Bidang Diplomasi Kebahasaan

1) Kekuatan

Bidang ini juga memiliki kekuatan nama *diplomasi kebahasaan* yang disandangnya. Sebagai *nama*, kata *diplomasi* telah menjadi pengetahuan umum sehingga masyarakat umum mudah memahami makna-makna yang terkandung dalam kata itu. Secara umum, kata *diplomasi* bermakna cara, teknik, atau taktik untuk bertutur kata dengan kesopansantunan atau dengan tidak menunjukkan ketegasan untuk menghindari komitmen mutlak. Secara khusus, dalam ranah kerja sama antar negara, kata dasar *diplomasi* digunakan untuk menamai sebuah unit kerja Ditjen Diplomasi Publik pada Kementerian Luar Negeri dan unit kerja Diplomasi Budaya pada Ditjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Selain kemudahan untuk memahami makna kata diplomasi, konsep ‘diplomasi kebahasaan’ juga memiliki kekuatan dasar yang mengacu pada konsep fungsi bahasa sebagai pembentuk kerja sama. Bahasa diciptakan pada dasarnya untuk membuat manusia saling bekerja agar menjadi sesama. Sudah mafhum bahwa negara bangsa Indonesia didirikan dan diharapkan tetap berdiri atas fondasi bahasa, bukan fondasi agama atau ras/suku karena bahasa Indonesia diciptakan agar semua warga negara atau seluruh anak bangsa Indonesia saling bekerja menjadi sesama Indonesia. Demikian pula pada tataran dunia global, warga dunia saat ini sangat bergantung pada sukses atau tidaknya kerja sama antarawarga atau kelompok warga dan ihwal kerja sama itu pada hakikatnya adalah masalah kebahasaan.

2) Kelemahan

Bidang Diplomasi Kebahasaan memiliki kelemahan di samping kekuatan tersebut. Pemahaman makna umum terhadap nama *diplomasi* itu berakibat pada lemahnya pemahaman makna khusus penamaan bidang ini. Sering dipahami strategi kebahasaan sebagai suatu cara, teknik, atau taktik berbicara seperti diplomasi melalui pidato atau orasi yang menggunakan unsur-unsur bahasa indah. Karena konsep diplomasi kebahasaan ini masih relatif baru, pemahaman atas konsep khusus bidang ini masih sulit diperoleh.

3) Peluang

Peluang untuk mengembangkan diplomasi kebahasaan masih terbentang sangat luas, antara lain karena pemahaman dan fokus perhatian terhadap fungsi bahasa sebagai sarana kerja sama menjadi sesama masih belum dicurahkan secara komprehensif pada semua bahasa. Peluang pengembangan diplomasi kebahasaan terbuka lintas-bahasa sehingga dalam usaha linguistik, misalnya untuk mempererat kerja sama, terbentang lintas-bahasa bahasa: antara bahasa Indonesia dan bahasa asing yang bernilai strategis untuk menginternasionalkan bangsa Indonesia melalui akses diplomasi kebahasaan ini.

4) Tantangan

Tantangan yang dihadapi oleh Bidang Diplomasi Kebahasaan dapat diidentifikasi sumbernya dari dalam dan dari luar bidang ini. Dari dalam, tantangannya dapat berupa sumber daya manusia yang memahami fungsi bahasa dan antar-bahasa untuk bekerja sama. Tantangan dari luar bidang dapat dilihat dari adanya lembaga lain yang juga bergerak dalam bidang diplomasi sehingga diplomasi kebahasaan tercakup di dalamnya dan tidak dijadikan fokus perhatian dalam praktik diplomasinya. Misalnya, ketika berintegrasi ke Asean dengan bangsa-bangsa sekawasan, bangsa Indonesia dibawa seperti pohon yang dicabut tanpa akarnya.

Mulai awal 2016, integrasi Asean sudah berlaku efektif, tetapi bangsa Indonesia masuk atau dimasukkan ke kerangka Masyarakat Ekonomi

Asean itu tanpa syarat wajib membawa bahasa Indonesia. Tantangan muncul: masih bulatkah tekad satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa: Indonesia? Dalam satu entitas regional di bidang ekonomi, integrasi Asean segera akan diperluas ke dalam bidang sosial-budaya dan politik serta keamanan. Semangat integrasi antar-bangsa ini pun tidak tanggung-tanggung: satu visi, satu identitas, dan satu komunitas Asean. Semangat Asean bersatu dan berbasis kerakyatan itu berawal dari tahun 2007 ketika Piagam Asean (*Asean Charter*) ditandatangani oleh semua kepala negara anggota. Di dalam rumusan Pasal 34 disebutkan bahasa Inggris-lah satu-satunya bahasa kerja Asean. Tantangan diplomasi kebahasaan adalah dengan berlakunya Piagam Asean, bagaimana integrasi komunitas bangsa Asean agar tidak akan memasung rakyat Asean berbahasa Inggris, termasuk rakyat Indonesia. Bagaimana bahasa Inggris dan bahasa asing strategis dari kawasan Asean dapat dijadikan akses diplomasi menginternasionalkan bahasa dan bangsa Indonesia.

3.3 Pengelolaan Kelembagaan PPSDK

1) Kekuatan

Telah disebutkan bahwa PPSDK berdiri di dalam Kawasan *Indonesia Peace and Security Center* (IPSC) yang menjadipusat terpadu *seven in one*: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; Badan Nasional Penanggulangan Bencana; Pusat Pelatihan Keberadaan lembaga PPSDK memungkinkan jumlah lembaga mitra pengembang strategi dan diplomasi kebahasaan didalam dan di luar negeri makin bertambah. Kekuatan itu juga didukung dengan atmosfer kemiliteran yang sudah barang tentu mendukung kedisiplinan kerja.

2) Kelemahan

Tanah pendirian bangunan PPSDK bukan milik Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kontur tanah itu mudah longsor; berisi banyak tali air; kondisi lahan di bawah jalan utama sehingga air hujan mudah masuk dari luar lokasi. Dalam kondisi itu

biaya pengelolaan lokasi PPSDK akan sangat besar untuk perawatan gedung dan lahannya.

Peluang

PPSDK memiliki peluang besar dalam pengelolaan lembaga menjadi modern karena minat pegawai untuk menempati terus meningkat. Pengelolaan lembaga ini juga berpeluang untuk meningkatkan kerjasama terutama dalam bidang pendidikan dengan lembaga/instansi baik nasional maupun internasional dan kesempatan ini sangat terbuka.

Tantangan

Jarak dari PPSDK ke Badan Bahasa di Jakarta cukup jauh sehingga urusan kedinasan menuntut pengelolaan. Pengaruh kondisi perbukitan sehingga biaya transportasi meningkat.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KEGIATAN PUSAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN

4.1 Target Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019, khususnya terkait pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan menargetkan kinerja 2015–2019 sebagai berikut.

PROGRAM DAN TARGET KINERJA PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN

No.	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2015	2016	2017	2018	2019
1.	I. Melaksanakan Penyusunan Pedoman Pengembangan Strategi Kebahasaan	a. Pedoman Pengembangan Strategi Kebahasaan	1. Pedoman Kebinekaan Bahasa	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			2. Pedoman Kebinekaan Sastra	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			3. Pedoman Kajian Forensik Kebahasaan	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			4. Pedoman Kegiatan Penerjemahan	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			5. Pedoman Kajian Pengajaran Bahasa Asing Strategis	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			6. Pedoman Kajian Implementasi Bahasa Indonesia Dasar Internasionalisasi	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			7. Pedoman Standardisasi Kompetensi Pengajar BIPA	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			8. Pedoman Peningkatan Kompetensi Pengajar BIPA	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
2.	I. Kajian Strategis Kebahasaan		1. Kajian tentang Kekerabatan dan Relasi Historis Bahasa-bahasa di Indonesia	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
		a. Penerbitan dan Penyusunan Kajian Strategi Kebahasaan	2. Kajian Kebinekaan bahasa Melayu dan Sebaran bahasa Austronesia	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			3. Kajian Kebinekaan Sastra	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			4. Kajian Forensik Kebahasaan	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			5. Kajian Potensi Konflik dan Adaptasi Sosial Kebahasaan	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			6. Kajian Dokumen Perjanjian Antarnegara	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			7. Kajian Perkara Pidana terkait Kebahasaan	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			8. Kajian Penyusunan Bahan Ajar Asing Strategis	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			9. Kajian Peningkatan Kompetensi Pengajar BIPA	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			10. Kajian Pengembangan Akomodasi Sosial Terkait Kebahasaan	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			11. Kajian Diplomasi Kebahasaan dalam Bahan Ajar Sains	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1

PROGRAM DAN TARGET KINERJA PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN

No.	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2015	2016	2017	2018	2019
3.	I. Bahan Kebijakan Teknis Pengembangan Strategi Kebahasaan	a. Seminar dan Lokakarya Kebahasaan Lembaga Adat	Tertaksana Kegiatan Lokakarya dan menghasilkan bahan kebijakan teknis	kegiatan dan peserta	Lanjutan	250	120	200	200	200
		b. Konferensi Internasional Pengembangan Literasi melalui Linguistik Fungsional sistemik	Tertaksana Kegiatan Lokakarya dan menghasilkan bahan kebijakan teknis	kegiatan dan peserta	Perencanaan Awal	-	250	250	250	250
		c. Seminar Internasional Mengenai Migrasi Bahasa Austronesia	Tertaksana Kegiatan Lokakarya dan menghasilkan bahan kebijakan teknis	kegiatan dan peserta	Perencanaan Awal	-	250	250	250	250
4.	Pemetaan Kebinekaan Bahasa	a. Kajian Pemetaan Genolinguistik	1. Kajian kredibel, sah, dan bahan masukan kebijakan ilmu pengetahuan dan pemertahanan wilayah negara NKRI	Dokumen	Lanjutan	14	14	17	20	23
5.	Pemertahanan wilayah Kebahasaan NKRI	a. Laboratorium Kebinekaan	1. Jumlah kekayaan bahasa dan sastra yang terdokumentasi dalam laborat kebinekaan	Unit Dokumen	internet dan pameran	persi apan	300	600	900	1200
6.	I. Penyusunan Pedoman Diplomasi Kebahasaan	a. Pedoman Diplomasi Kebahasaan	1. Pedoman Pembelajaran Bahasa Asing Strategis	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			2. Pedoman Pembelajaran BIPA	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			3. Pedoman Peningkatan Mutu Penerjemahan	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
			4. Pedoman Penerjemahan Dokumen Strategis	Dokumen	Lanjutan	1	1	1	1	1
7.	Peserta Pembelajaran bahasa asing strategis	a. Pelatihan bahasa asing strategis bagi staf kawasan IPSC dan guru-guru	1. Terlaksana da tercapainya target pelatihan bahasa asing strategis	peserta	Lanjutan	400	500	600	700	800
8.	Bahan Ajar Pengajaran BIPA	a. Penyusunan bahan ajar pengajaran BIPA	1. tersusunnya bahan ajar dan melibatkan seluruh ekosistem serta <i>stakeholder</i> BIPA	Dokumen	Lanjutan	6	7	8	9	10
9.	Peserta Pembelajaran BIPA untuk orang asing	a. Pelatihan BIPA untuk orang asing	1. terlaksana dan tercapainya pelatihan sesuai target yang ditetapkan	peserta	persiapan	-				
							200	250	300	350
10.	Tenaga pengajar BIPA di luar negeri	a. Pelatihan tenaga pengajar BIPA	1. terlaksananya dan tercapainya pelatihan sesuai target yang ditetapkan	peserta	Lanjutan	20	25	30	35	40

PROGRAM DAN TARGET KINERJA PENGEMBANGAN STRATEGI DAN DIPLOMASI KEBAHASAAN

No.	KEBIJAKAN	PROGRAM	TARGET KINERJA							
			INDIKATOR	SATUAN	BASELINE	2015	2016	2017	2018	2019
10.		b. Pengiriman tenaga pengajar BIPA ke luar negeri	1. Berhasilnya pengiriman tenaga BIPA ke luar negeri	peserta	Lanjutan	20	80	100	120	140
11.	Dokumen terjemahan	a. Penerjemahan dokumen strategis	1. Terlaksana dan tercapainya proses penerjemahan dokumen strategis untuk kepentingan regulasi kebijakan	dokumen	Lanjutan	20	200	250	300	350
12.	Penerjemahan lisan dan tulis	a. Pelatihan penerjemahan	1. terlaksana dan tercapainya target peserta pelatihan penerjemahan	peserta	Lanjutan	27	100	125	150	175
13.	Bahan fasilitasi pelaksanaan diplomasi kebahasaan	a. Penyusunan bahan fasilitasi untuk institusi penyelenggara BIPA di luar negeri	1. Tersusunnya bahan fasilitasi secara baik dan dapat digunakan oleh khalayak	dokumen	Lanjutan	5	20	35	50	65
			2. Penyusunan bahan fasilitasi untuk lembaga internasional pengguna bahasa Indonesia	dokumen	Lanjutan	5	20	35	50	65
14.	Lembaga Internasional pengguna bahasa Indonesia terfasilitasi	a. Fasilitasi lembaga internasional pengguna Bahasa Indonesia	1. Terlaksananya kegiatan fasilitasi sesuai target	peserta	Lanjutan	35	70	105	140	175
		b. Fasilitasi pelaksanaan diplomasi penginternasionalan bahasa Indonesia	2. Terlaksananya fasilitasi diplomasi dengan baik serta sesuai target	lembaga	Lanjutan	2	10	18	26	34
15.	Institusi penyelenggara BIPA di Luar Negeri terfasilitasi	a. Fasilitasi lembaga penyelenggara BIPA	1. Terlaksananya kegiatan fasilitasi dengan baik dan sesuai target yang ditetapkan	lembaga	Lanjutan	5	20	35	50	65
16.	Laboratorium kebinekaan bahasa dan perpustakaan	a. Pengelolaan laboratorium kebinekaan	1. Terkelolanya manajemen laboratorium kebinekaan dengan baik	pengunjung	persiapan	-	300	600	900	1200
		b. Pengelolaan perpustakaan	2. Terkelolanya manajemen perpustakaan dengan baik	pengunjung	persiapan		100	200	300	400

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) berdiri di penghujung akhir tahun 2014. Jadi dilihat dari kapasitas umur sebagai pusat baru di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menghasilkan sedikit karya yang dapat dipersembahkan pada bangsa dan negara. Berbagai karya pada 2015 ini seperti 10 Pedoman Kajian Pengembangan Strategi Kebahasaan, 10 Kajian Pengembangan Strategi Kebahasaan setidaknya menjadi bahan masukan serta regulasi undang-undang, peraturan pemerintah atau apapun itu namanya dapat digunakan sebagai bahan dasar pengambil kebijakan pemerintah untuk mengakomodasi tentang penanganan dan penginternasionalisasian bahasa Indonesia serta memperhatikan kajian bahasa-bahasa daerah di Indonesia yang telah terpetakan, yaitu 659 bahasa.

Rencana Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan ingin mewujudkan laboratorium kebinekaan kebahasaan segera menjadi momentum Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai kegiatan unggulan serta harus didukung oleh semua ekosistem di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Setidaknya, melalui laboratorium kebinekaan Kebahasaan ini anak bangsa sebagai generasi penerus dapat memahami bahwa dibalik keberagaman bahasa daerah yang jumlahnya 659 bahasa dapat disatukan dengan semangat kekerabatan bahasa dalam wadah atau media laboratorium kebinekaan. Untuk itu, pada 2016 ini miniatur laboratorium kebinekaan kebahasaan tindak lanjut dari kegiatan Semiloka Lembaga Adat tahun 2015 menghasilkan rekaman 70 rekaman kebinekaan kebahasaan dapat diluncurkan dan terbentuk sebagai model laboratorium kebinekaas kebahasaan masa depan.

Tidak kalah hebatnya tindak lanjut kegiatan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan mulai 2016 mencanangkan 16 bidang kegiatan unggulan Bidang Strategi dan Diplomasi Kebahasaan yang sudah tertata dalam matriks target kegiatan. Untuk itu, sebagai ekosistem baru di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan ingin mewujudkan berbagai kegiatan yang telah dicanangkan dengan semangat inovasi baru, cepat, cekatan, trampil, dan menghasilkan karya yang berdampak luas bagi masyarakat penggunam, penikmat, pembaca, serta kalangan luas pemerhati kajian strategi dan diplomasi kebahasaan.

4.2 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendanaan pendidikan, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Anggaran Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun anggaran 2015–2019.

4.3 Sistem Pemantauan dan Evaluasi

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh institusi terkait, antara lain Bappenas, DJA Kemenkeu, Itjen Kemdikbud, BPKP, BPK, Biro Keuangan Kemdikbud, Biro PKLN Kemdikbud, serta unit internal terkait. Pemantauan dan pelaporan dilakukan setiap minggu melalui E-MSA, setiap bulan melalui E-Monev DJA, setiap triwulan melalui E-Bappenas, setiap tahun melalui LAKIP.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan telah disusun berdasarkan Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2015–2019 sesuai dengan RPJMN dan Renstra Kemdikbud Tahun 2015–2019 serta dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahap, di antaranya 1) mengkaji dokumen yang relevan dengan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan; 2) interaksi dengan para pemangku kepentingan yang terkait dengan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra baik di pusat, maupun daerah dan seluruh jajaran Badan Bahasa Kemendikbud; 3) menganalisis seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan hingga saat ini; 4) menyusun renstra.

Renstra ini menjadi acuan bagi PPSDK Badan Bahasa dalam melaksanakan berbagai program sesuai dengan tugas dan fungsinya.